

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 29 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PRODUK HUKUM LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
DITETAPKAN PADA TAHUN 2023**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi hukum, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ditetapkan pada Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Ditetapkan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab dan Anggota Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum bertanggung jawab terhadap analisis dan evaluasi hukum.
 2. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum bertugas melakukan kegiatan:
 - a. analisis dan evaluasi kerangka regulasi LKPP Tahun 2023;
 - b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum LKPP tahun 2023;
 - c. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum LKPP Tahun 2023;
 - d. penyusunan daftar program kerangka regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Tim Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP
PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2023

NOMOR : 29 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Mei 2024

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PRODUK HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2023**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/ Jabatan
1.	Penanggung Jawab	: Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua Tim	: Rinaldi Morintoh
3.	Anggota	: 1. Rasmita Juliana Sitepu; 2. Inamawati Mastuti Dewi; 3. Asih Riska Nurmasari; 4. Carolina Maria Anggreini; 5. Yogie Prastiyans; 6. Apriliansyah Ariyoga; 7. Muhamad Bayu Firmansyah; 8. Salwa Nida.

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN